

Optimalisasi penegakan perda melalui *SiPraJa* oleh satuan polisi pamong praja Provinsi Jawa Tengah

Enggar Mustofa¹, Muzilah Nur Madhani², Risqi Ibnu Destiawan³, Rosfathma Cahyaning Safitri⁴

^{1,2,3,4}Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat

¹30.0665@praja.ipdn.ac.id, ²30.0704@praja.ipdn.ac.id, ³risqibnu14@gmail.com, ⁴30.0719@praja.ipdn.ac.id

Info Artikel :

Diterima :
5 Agustus 2022
Disetujui :
20 Agustus 2022
Dipublikasikan :
25 Agustus 2022

ABSTRAK

Jurnal ini mengulas tentang bagaimana digitalisasi pada organisasi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan Sistem Informasi Penegakan Peraturan Daerah Jawa Tengah (SiPraJa). Adapun instrumen penelitiannya yaitu observasi, dan wawancara. Dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data primer melalui wawancara bersama Kepala Bidang Penegakan Produk dan Hukum Daerah Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dengan ditambah data sekunder dari sumber literasi berupa manual book aplikasi SiPraJa. Hasil penelitian ini adalah pengembangan aplikasi SiPraJa diharapkan dapat membantu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dalam penegakan peraturan daerah, meski dalam prosesnya masih ditemukan beberapa kendala dalam hal pengaduan dan pelaporan kasus pelanggaran peraturan daerah.

Kata kunci: Digitalisasi, Penegakan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja

ABSTRACT

This review examines how to implement digitization in the regional apparatus organization of the Pamong Praja Police Unit (Satpol PP) of Central Java Province using the Central Java Regional Regulatory Enforcement Information System (SiPraJa). Finding aids are observation and interviews. In this review, we use qualitative research methods with primary data sources through interviews with the head of product application and regional law with the addition of secondary data from literacy sources in the form of SiPraJa application manuals. The result of this study is the use of the SiPraJa app to help members of the Pamong Praja Police Unit in Central Java Province enforce regional regulations, but there are still obstacles in the complaint process and reporting cases of violation of local regulations.

Keyword: Digitization, Pamong Praja Police Unit (Satpol PP), Regional Law Enforcement



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Era saat ini akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memegang peran penting dalam segala bidang kehidupan. Pandemi yang telah terjadi memperkuat teknologi informasi untuk menjadi sebuah faktor yang mempermudah penyelesaian dan pemenuhan kebutuhan manusia. Penciptaan teknologi dimaksudkan untuk mempermudah dan mendukung kegiatan manusia dan organisasi. Saat ini banyak organisasi pemerintahan yang menerapkan teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi (Tri Yulianti & Tri Prastowo, 2021). Pemanfaatan teknologi dapat mengubah budaya organisasi ke arah lebih disiplin, efektif, dan efisien (Raza et al., 2020).

Berdasarkan ketentuan pasal 255 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) (Yeria et al., 2020). Hal ini dikarenakan filosofi pembentukan Perda sesungguhnya untuk menciptakan tata kehidupan masyarakat yang lebih baik, untuk menjamin ketertiban umum dan ketentaman masyarakat sehingga diharapkan dengan adanya penegakan terhadap perda tersebut akan patuh terhadap hukum dari pemerintahan daerah yang ada.

Hingga saat ini tercatat sebanyak 147 Perda yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Namun terdapat beberapa perda yang membutuhkan prioritas penanganan yang didalamnya memuat aturan sanksi pelanggaran baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana beberapa perda dimaksud utamanya perda yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD), serta berkaitan dengan terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum.

Adanya kebutuhan tersebut yang diikuti perkembangan teknologi informasi di Indonesia yang berkembang pesat saat ini, maka pembuatan aplikasi Sistem Informasi Penegakan Perda Jawa Tengah (*SiPraJa*) menjadi salah satu strategi yang perlu disiapkan. Untuk memantau pelanggaran terhadap perda, peran serta masyarakat dan stakeholder yang berasal dari SKPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam pelanggaran perda ini sangat diperlukan, laporan-laporan terhadap setiap jenis pelanggaran menjadi modal dasar Satpol PP dalam melakukan penindakan.

Pembangunan sistem *SiPraJa* ini nantinya diharapkan dapat menampung laporan-laporan pelanggaran terhadap perda yang dimaksud dan menyajikannya dalam waktu yang cepat dan tepat, sehingga akan berguna bagi pengambilan keputusan dalam melakukan tindakan apa yang perlu diambil oleh SKPD terkait maupun tindakan lanjutan dari Satpol PP Provinsi Jawa Tengah. Sistem *SiPraJa* yang dibangun nantinya juga harus dapat terintegrasi dengan sistem-sistem terkait yang sudah ada sebelumnya, diantaranya sistem perijinan yang di kelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan dengan adanya integrasi sistem akan mempermudah pelaksana dalam mengetahui data pendukung terhadap pelanggaran perda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada 11 Mei 2022 hingga 3 Juni 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.

Pengumpulan informasi menggunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data memakai data sekunder yang didapat dari dokumen formal, buku, hasil riset yang berwujud studi lapangan (wawancara). Pengumpulan data sekunder penelitian ini melalui studi pustaka, yaitu data yang diperlukan didapat melalui pengumpulan dan analisis beragam informasi yang berasal dari bahan materi hukum serta informasi yang bersumber dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah. Analisis data penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi disederhanakan dan diklasifikasikan terlebih dahulu. Data yang telah disederhanakan dan diklasifikasikan tersebut kemudian digabungkan menjadi informasi yang dapat disajikan dalam bentuk pernyataan naratif. Informan pada penelitian ini adalah Kepala Bidang Penegakan Produk dan Hukum Daerah Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas tentang bagaimana pelaksanaan digitalisasi pada organisasi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan Sistem Informasi Penegakan Peraturan Daerah Jawa Tengah (*SiPraJa*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan penegakan perda di setiap daerah masing masing. Satpol PP Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa bidang terkait pelaksanaan tupoksinya, antara lain bidang perlindungan masyarakat, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan bidang penegakan perda, serta bidang pembinaan masyarakat.

Menurut keterangan Kepala Bidang Penegakan Produk dan Hukum Daerah Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Tubayanu, AP., M.Si., dalam penegakan perda terjadi berbagai kasus pelanggaran di berbagai bidang, dimana Satuan Polisi Pamong Praja harus mampu bergerak secara optimal dalam menangani pelanggaran-pelanggaran, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Untuk mempermudah memproses kasus pelanggaran ditindaklanjuti, maka adanya proses pelaporan dan pengaduan dari masing masing OPD, baik Kabupaten maupun Kota di Jawa Tengah yang masih menggunakan sistem pelayanan kerja berbasis kertas (*paper base report*) dimana rekapan data-data pelanggaran tersebut menggunakan berkas fisik yang dikirimkan masing masing OPD kabupaten/kota agar dapat direkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, sehingga pihak Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah mengetahui data-data pelanggaran tersebut agar selanjutnya dapat ditindak

lanjuti. Penindaklanjutan berupa pelayangan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali bila tidak dihiraukan maka akan dikenakan sanksi tindakan maupun denda sesuai dengan aturan yang berlaku.

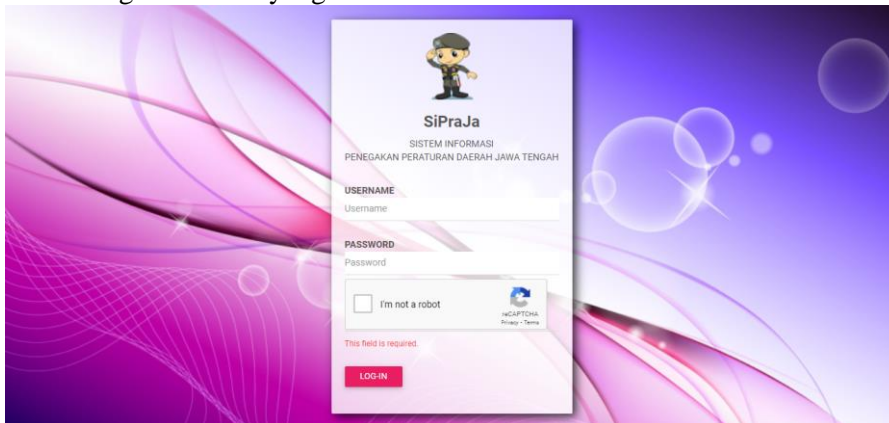
Aspek – Aspek Penghambat Penegakan Peraturan Daerah

Beberapa aspek penghambat penegakan Perda yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- Kurang efektif dan efisiennya proses pelaporan dan pengaduan menggunakan pelayanan berbasis kertas
- Dengan data dan rekapan menggunakan berkas fisik, maka rawan tercecer dan hilang
- Proses penindak lanjutan pelanggaran kurang berjalan dengan baik
- Prosesnya cukup memakan waktu karena sistem kerja berbasis kertas (*paper base report*)

Optimalisasi Penegakan Perda melalui SiPraJa

Pembuatan Sistem Informasi Penegakan Perda Jawa Tengah (*SiPraJa*) pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dibangun dengan menggunakan konsep basis data RDBMS (*Relational Database Management System*) yang mana pada prinsipnya sistem ini menggabungkan tabel-tabel dengan beberapa metode untuk bekerjasama. Penggunaan RDBMS ini telah sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini.



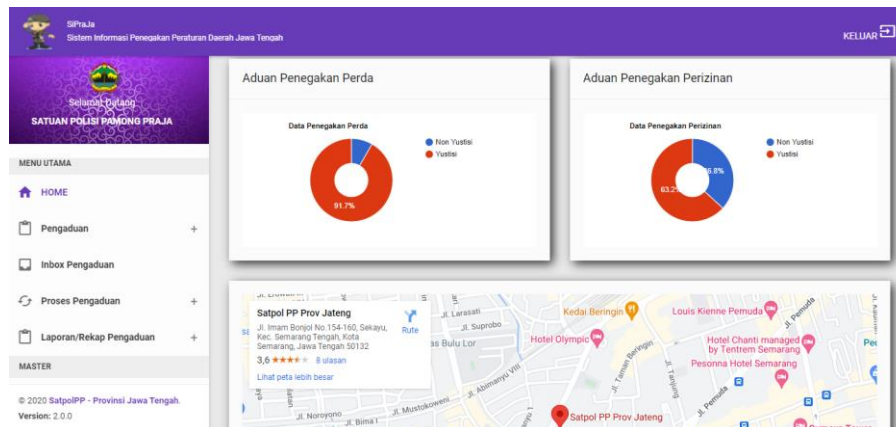
Gambar 1 Halaman Log-in *SiPraJa*

Sumber: Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambaran umum Sistem Informasi Penegakan Perda Jawa Tengah (*SiPraJa*) pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi pelanggaran perda dan proses berjenjang serta penindakan berjenjang setiap pelanggaran perda yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah. Sistem Informasi Penegakan Perda Jawa Tengah (*SiPraJa*) merupakan sebuah aplikasi berbasis web menggunakan *PHP MySQL* yang berfungsi untuk mempermudah dalam proses input dan *manage* data yang telah ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya Sistem Informasi Penegakan Perda Jawa Tengah (*SiPraJa*) dokumentasi, monitoring dan pelaporan data pelanggaran perda menjadi lebih terstruktur serta memudahkan pengambilan keputusan kepada institusi dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Upaya penyusunan data dan informasi selama ini telah dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, namun masih perlu untuk lebih dimantapkan dan ditingkatkan untuk mengakomodasi perkembangan kemajuan dibidang teknologi data dan informasi di daerah. Untuk itu perlunya meningkatkan produktivitas SDM aparatur dalam melakukan penyusunan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta pelayanan dengan mengubah sistem kerja berbasis kertas (*paper base report*) menjadi sistem kerja berbasis komputer (*computer base report*) sehingga lebih efektif dan efisien. Dengan adanya Sistem Informasi Penegakan Perda Jawa Tengah (*SiPraJa*) pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta kabupaten/kota dalam membangun tata pemerintahan yang baik di tingkat provinsi dan juga meningkatkan interaksi masyarakat terhadap pelayanan publik.

Alur kerja sistem ini atau yang lebih umum diberi nama (*Business Process*) yaitu menggabungkan data yang sudah ada (*existing*) untuk diolah bersama data yang terbaru (*manual input data*) untuk kemudian ditampilkan secara visual pada media *Web* mempunyai akses luas ke semua *User*.



Gambar 2 Halaman Beranda *SiPraJa*
Sumber: Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, 2022

Sistem Informasi Penegakan Perda Jawa Tengah (*SiPraJa*) pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah merupakan aplikasi yang dibuat melalui proses studi dan analisa, sehingga dapat disusun sebuah algoritma pemrograman yang baik agar didapatkan sistem yang terukur dan normal.

Menurut keterangan Kepala Bidang Penegakan Produk dan Hukum Daerah Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Tubayanu, AP., M.Si., berbagai upaya telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memanfaatkan teknologi informasi antara lain dengan membangun Sistem Informasi Penegakan Perda Jawa Tengah (*SiPraJa*). Namun, untuk dapat memanfaatkan informasi seoptimal mungkin perlu dilakukan pengembangan aplikasi yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, sehingga data dan informasi yang ditampilkan akan tepat, cepat, akurat, valid serta dapat menunjang pekerjaan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.

Setelah melalui proses analisa kebutuhan dan analisa alur sistem, maka kriteria yang dibutuhkan untuk Pembuatan Sistem Informasi Penegakan Perda Jawa Tengah (*SiPraJa*) pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah adalah perancangan sistem yang baik dan terstruktur sesuai kaidah-kaidah perancangan sistem. Data awal yang digunakan dan sebagai acuan dalam pembuatan aplikasi yang kemudian dikembangkan untuk mempermudah dalam *inputting*, *updating*, serta dalam rangka meningkatkan kualitas pekerjaan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah. Dari data yang telah ada itulah kemudian dikembangkan Sistem Informasi Penegakan Perda Jawa Tengah (*SiPraJa*) pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tugas dengan baik dalam penegakan Perda. Namun, perlu adanya pengembangan dan optimalisasi agar mempermudah kinerja Satpol PP dalam Penegakan Perda
2. Beberapa aspek penghambat kinerja Satpol PP dalam Penegakan Perda tersebut adalah kurang efektif dan efisiennya proses pelaporan dan pengaduan menggunakan pelayanan berbasis kertas. Dengan data dan rekapan menggunakan berkas fisik maka rawan tercecer dan hilang, Prosesnya cukup memakan waktu karena sistem kerja berbasis kertas (*paper base report*), dst.
3. Dengan adanya beberapa aspek penghambat tersebut mendorong Satpol PP Provinsi Jawa Tengah menciptakan *SiPraJa* untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam Penegakan Perda

Setelah melalui penelitian, maka peneliti dapat memberikan beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Untuk mempermudah dan meningkatkan kinerja Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah di seluruh daerah di Indonesia, sebaiknya Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja di daerah atau provinsi lain juga mengadopsi aplikasi atau sistem yang serupa dengan *SiPraJa* yang ada di Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.
2. Dalam penerapan aplikasi atau sistem tersebut sebaiknya diikuti dengan adanya pelaksanaan sosialisasi dan pembekalan atau bimbingan teknis bagi para anggota Satpol PP, sehingga optimalisasi pelaksanaan penegakan perda secara digital atau modern dapat terwujud dengan baik.
3. Pelaksanaan sosialisasi dan pembekalan atau bimbingan teknis terkait aplikasi atau sistem tersebut sebaiknya dilaksanakan dengan bertahap dan dilengkapi dengan adanya video tutorial yang bisa diakses secara mudah dan berulang oleh para anggota Satpol PP di daerah, misalnya di-*upload* melalui akun *Youtube* Satpol PP.

DAFTAR PUSTAKA

- Raza, E., Sabaruddin, L. O., & Komala, A. L. (2020). Manfaat dan Dampak Digitalisasi Logistik di Era Industri 4.0. *Jurnal Logistik Indonesia*, 4(1), 49–63. <https://doi.org/10.31334/logistik.v4i1.873>
- Suaib, E., Jamal, J., & Indriati, R. (2020). *Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Provinsi Lampung* Eka Suaib, Jamal Jamal, Ratna Indriati. November.
- Tri Yulianti, D., & Tri Prastowo, A. (2021). Pengembangan Digitalisasi Perawatan Kesehatan Pada Klinik Pratama Sumber Mitra Bandar Lampung. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi (JTISI)*, 2(2), 32–39. <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/JTISI>
- Yeria, D., Fitrah, N., & Daud, Y. (2020). Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Mamasa. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 2(2), 322. <https://doi.org/10.35329/jp.v2i2.1163>
- Komarudin. 1994. *Ensikolopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah